

Artikel Info

<i>Received:</i> March 23, 2023	<i>Revised:</i> April 15, 2023	<i>Accepted:</i> May 18, 2024	<i>Published:</i> June 28, 2024
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perangkat Desa Di Wilayah Kabupaten Mojokerto Terhadap PBG/SLF Sesuai PP No. 16 Tahun 2021

Diah Sarasanty^{1*}, Erna Tri Asmorowati², Akbar Rizky Nurcahyanto³, Rizal Cahyadi⁴

Universitas Islam Majapahit*^{1, 2, 3, 4}

¹*email:* diahsarasanty@gmail.com

²*email:* asmoro1221@gmail.com

³*email:* akbarrizky922@gmail.com

⁴*email:* rizaaldi@gmail.com

Abstract: It is impossible to resist the growth of building construction in the Mojokerto City and Regency as a PKN (National Activity Support) area. All parties involved, though, need to approach this objectively in order to ensure that building development continues to adhere to the RTRW and maintain user comfort, safety, and health. Therefore, the government has set up a licensing system through <https://simbg.pu.go.id/> to facilitate building permits. Offering technical advice on building construction in the Mojokerto City and Regency region is the goal of this activity. The 12-month duration of this activity is set for January 2023 to December 2023. Publication in community service journals and community education initiatives on the PBG/SLF procedure are the anticipated results.

Abstrak: Pertumbuhan konstruksi bangunan di Kota dan Kabupaten Mojokerto sebagai kawasan PKN (Penunjang Kegiatan Nasional) tidak mungkin bisa dibendung. Namun, semua pihak yang terlibat perlu melakukan pendekatan secara objektif guna memastikan pembangunan gedung tetap mematuhi RTRW dan menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sistem perizinan melalui <https://simbg.pu.go.id/> untuk memudahkan izin mendirikan bangunan. Memberikan bimbingan teknis pembangunan gedung di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto menjadi tujuan kegiatan ini. Durasi kegiatan ini selama 12 bulan ditetapkan pada Januari 2023 hingga Desember 2023. Publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat dan inisiatif edukasi masyarakat mengenai

<p>Keywords: Construction, Government, Safety, Guidance, Technical</p>	<p>prosedur PBG/SLF merupakan hasil yang diharapkan.</p> <p>Kata Kunci: Konstruksi, Pemerintah, Keselamatan, Bimbingan, Teknis</p>
---	---

A. Pendahuluan

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, serta Kota Surabaya, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), merupakan bagian dari wilayah PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Peran wilayah ini adalah untuk mendukung operasi nasional, internasional, atau provinsi. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh pembangunan yang besar terhadap Kabupaten Mojokerto baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Pertumbuhan tersebut ditandai dengan banyaknya proyek pembangunan sarana dan prasarana baik di Kota maupun Kabupaten Mojokerto. Pembangunan sarana dan prasarana bangunan tentunya harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kemudahan penggunaan. Oleh karena itu, setiap penghuni wajib memenuhi kriteria administratif dan teknis pemeliharaan bangunannya.

Pemerintah daerah wajib dan berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan (PBG) dan surat keterangan laik fungsi (SLF) suatu bangunan gedung. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dapat membentuk Tim Tenaga Profesional Ahli (TPA), yaitu sekelompok tenaga ahli profesional yang dipilih oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pembangunan bangunan gedung. Landasan hukum pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2022).

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam upaya memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan mengatasi permasalahan teknis izin bangunan dan sertifikat laik

fungsi(Yati, Amin, Ghulam R, & Utami, 2018)(Yoedono & Murdiyanto, 2020)(David S.V. L Bangguna, Ebelhart O. Pandoyu, Elisabeth O. Wuon, Pujiono,Henny I. Abulebu, 2021)(Sarasanty, Sutrisno, & Andriyanto, 2022)(Sarasanty, Sutrisno, & Asmorowati, 2021). Keuntungan dari usaha ini masyarakat diberikan masukan teknis dalam perencanaan bangunan yang diusulkan dan menjamin bahwa struktur yang telah selesai mematuhi semua peraturan dan standar teknis yang berlaku untuk menjaga kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan pengguna bangunan(Jumiati Ilham, Ervan Hasan Harun, 2023)(Muhammad Yunus, Nurul Muhlisah & Supriyani Lomo, 2023). Hasil yang diinginkan adalah saran teknis perencanaan bangunan bagi pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Seminar kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Mojokerto tentang sosialisasi persetujuan bangunan dan sertifikat laik fungsi.
2. Dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat.

B. Metode Penelitian

SLF disusun berdasarkan jadwal yang dibuat oleh mitra, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang dan Permukiman, dan PkM dilaksanakan oleh para TPA yang memberikan bimbingan teknis kepada calon PBG. Tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan yang diberikan oleh Tim Ahli Profesional juga akan dinilai dalam PkM ini berdasarkan seberapa baik kegiatan dilaksanakan. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat (akurat) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan), khususnya dalam memberikan pelayanan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan bebas kesalahan, b. Daya tanggap karyawan mengacu pada kesiapan atau keinginan mereka untuk membantu memberikan layanan yang dibutuhkan pelanggan, c. Assurance, yang mencakup kompetensi, kemampuan, keramahan, kesopanan, dan karakter keandalan interaksi tatap muka untuk menghilangkan kekhawatiran pelanggan dan memberikan mereka rasa

aman, d. Empati, yang mencakup berbicara dengan pelanggan secara langsung atau melalui perusahaan untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka serta memberikan mereka perhatian individual dan komunikasi sederhana, e. Barang berwujud, aksesibilitas ruang fisik, peralatan, dan panduan komunikasi, antara lain yang dapat dan harus dimasukkan ke dalam prosedur pelayanan.

Pendekatan *Learning by Doing* (Sarasanty, Diah; Tri Asmorowati, Erna; Nizar Zulfika, 2023) (Yuni Ulfiyat, M. Shofiul Amin, Mirza Ghulam R, 2018) digunakan untuk melaksanakan pengabdian ini, yang dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain: a. Menilai kebutuhan masyarakat, tim melakukan observasi lapangan pada tahap pertama untuk mengumpulkan data mengenai tantangan mitra dan solusi yang akan diberikan untuk mengatasinya, b. Menyiapkan tempat dan fasilitas sosialisasi : infrastruktur dan lokasi pelatihan disiapkan untuk menjamin sesi pelatihan berjalan tanpa hambatan. DPUPR Kabupaten Mojokerto menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pelatihan berupa ruangan atau lokasi pelaksanaan. Tim yang bertanggung jawab melaksanakan aktivitas menyiapkan komputer, sumber daya, dan standar teknis, c. Sosialisasi Kegiatan PKM, tujuan dari tahap sosialisasi adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat umum tentang apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk jenis kegiatan yang akan dilakukan, teknis pelaksanaannya, dan siapa saja yang mengikuti kegiatan sosialisasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi singkat lokasi Pengabdian kepada Masyarakat

Penjelasan singkat tentang Pengabdian Masyarakat terkait tempat yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pendataan yaitu diagendakan hari Kamis, 14 Juli 2023, di Hotel Ayyana Trawas Mojokerto. Upaya ini telah berhasil bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Pencapaian Tujuan dan Hasil PKM

Tahapan pencapaian target dan keluaran kegiatan diuraikan menggunakan strategi implementasi, dengan banyak modifikasi yang dilakukan sebagai respon terhadap kondisi

lapangan diantaranya pengumpulan data semua bangunan terletak di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pendataan dan pendaftaran bangunan secara bersamaan dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, yaitu pada saat: permohonan izin mendirikan bangunan; mengajukan permohonan perubahan izin mendirikan bangunan; mengajukan permohonan sertifikat kelayakan fungsional dan perpanjangannya; dan pembongkaran bangunan, guna memenuhi target pengumpulan data yang cukup luas dan memerlukan ketelitian.

2.1. Survei Lokasi

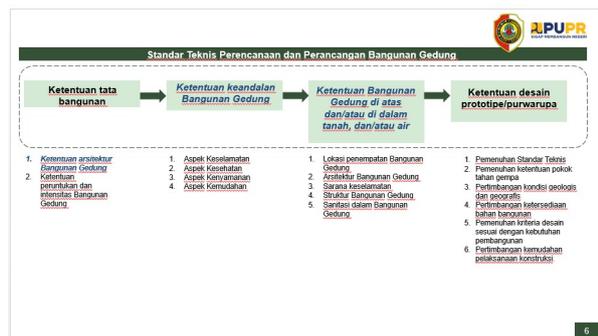
Survei lokasi dilakukan guna mengetahui permasalahan apa saja yang dialami mitra terhadap Dinas PUPR melalui wawancara. Temuan survei dan observasi lapangan menunjukkan hal tersebut menentukan masalah utama dengan penyedia layanan saat ini, khususnya : a) Penyusunan dokumentasi teknis Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) memerlukan informasi dasar yang saat ini belum dimiliki oleh mitra pelayanan. b) Penyedia jasa belum menguasai persyaratan teknis yang diperlukan untuk mengajukan Persetujuan Mendirikan Bangunan. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.



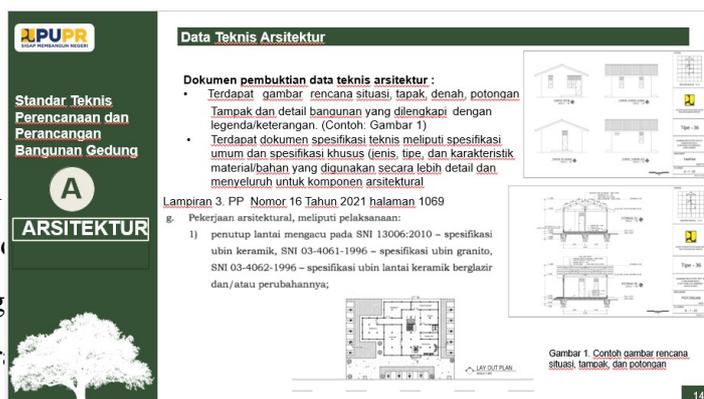
Gambar 1. Foto Kegiatan Bimbingan dan Konsultasi Dokumen Teknis Pemohon PBG/SLF

2.2. Menyiapkan tempat dan fasilitas untuk bersosialisasi

Tempat dan sarana prasarana telah siap agar acara sosialisasi dapat berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan ini, yang sangat membantu dalam efisiensi operasional. Dinas PUPR menyediakan ruangan dan peralatan bantu serta sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan. Materi dan modul penyiapan dokumen persetujuan bangunan disiapkan oleh tim pelaksana kegiatan PkM. Modul Materi Pemaparan (PBG dan SLF) : 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) 2. Standar Teknis Penyerahan PBG dan SLF dikembangkan sebagai bahan sosialisasi yang disajikan dalam gambar 2.



2.3. Pelaksanaan Tim Pengabdian Masyarakat kepada perangkat desa mengenai kegiatan pengabdian masyarakat



kepada perangkat desa pelatihan ini, tim pelaksana dan apa yang

harus dipersiapkan oleh calon peserta untuk memastikan kelancaran proses sosialisasi. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Mojokerto dan antusiasnya sangat tinggi. Perangkat desa Pemerintah Kabupaten Mojokerto aktif melakukan dialog dan tanya jawab dengan tim pengabdian mengenai kesulitan dalam menyusun dokumentasi teknis izin mendirikan bangunan yang selama ini terjadi di Kabupaten Mojokerto. Gambar 3 menunjukkan dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama 11–13 Juli 2023.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk membekali aparatur/pegawai desa di lingkungan Kabupaten Mojokerto dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: memetakan hasil pendataan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan; memanfaatkan hasil pendataan bangunan; dan memahami serta melaksanakan pengumpulan data, klasifikasi data dan persyaratan pengumpulan data, proses pelaksanaan pengumpulan data. Ada lima puluh orang yang hadir dalam latihan ini, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, perusahaan konstruksi swasta, dan BPD. Peserta pada kegiatan pelatihan ini mendapatkan materi tentang: 1) Penyelenggaraan pengumpulan data bangunan. 2) Mengklasifikasikan data dan menetapkan spesifikasi pengumpulan data. Perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan. 3) Pelaksanaan prosedur pendataan bangunan. 4) Memetakan dan menerapkan hasil pengumpulan data jajaran

Pemerintah Kabupaten Mojokerto turut hadir dan membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Secara umum, isi pelatihan adalah: 1. Pengumpulan data dilakukan pada tahap perencanaan permohonan izin mendirikan bangunan. Izin Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG) diterbitkan berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahap perencanaan. 2. Tahap pelaksanaan: Data dikumpulkan pada akhir tahap pelaksanaan konstruksi yang menjadi landasan bagi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan sebelum bangunan dapat dihuni. 3. Tahap Pemanfaatan, dilakukan dua tahap pendataan, yaitu: pertama, pada saat masa berlaku SLF akan segera berakhir dan pendataan pada saat suatu bangunan akan dibongkar karena tidak berfungsi lagi dan menimbulkan risiko terhadap lingkungan atau tidak serta tidak memiliki PBG.

3. Luaran Kegiatan

Berdasarkan hasil pelatihan, peserta mampu : 1) Mengetahui ide dasar pengembangan pengumpulan data. 2) Memeriksa elemen-elemen penting saat membuat dokumen teknis untuk PBG dan SLF. 3) Menghitung rincian teknis sesuai dengan standar. Selain itu, peserta sosialisasi ini juga mendapatkan : 1) Modul yang digunakan peserta sebagai sumber belajar selama dan setelah program berlangsung. 2) Softcopy yang berisi teknis perhitungan program yang telah dibuat dalam rangka penyerahan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk setiap MEP, arsitektur, dan komponen struktural juga telah disertakan dalam *softcopy* yang dikirimkan untuk membantu pembuatan makalah PBG dan SLF.

Sedangkan untuk luaran utama yaitu kemampuan mengumpulkan data dan menyiapkan dokumentasi teknis untuk pengajuan PBG/SLF, kegiatan pengabdian ini menghasilkan luaran sekunder sebagai berikut: 1) Artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal pengabdian masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil Sosialisasi Pendataan Bangunan Gedung dalam Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsional yang dilakukan Kabupaten Mojokerto, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Jumlah peserta yang hadir

melampaui target yang telah ditentukan, yaitu 70 orang yang hadir dari 50 orang yang diharapkan. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya mitra untuk mengambil bagian dalam proses sosialisasi. 2) Peserta dapat memahami gagasan pengembangan sistem pendataan. 3) Peserta mampu memahami cara penyampaian SLF dan PBG. 4) Kemampuan memahami unsur-unsur penting dalam pembuatan dokumen teknis PBG dan SLF. 5) Karena aparat desa berperan sebagai perantara dalam pelaksanaan program pemerintah dan mempunyai kualifikasi untuk melakukan kegiatan teknis pelaksanaan pembangunan di lapangan, maka pelatihan ini akan memudahkan komunikasi antar pihak yang berkepentingan dengan teknik dan referensi yang sama. Hal ini akan menjamin keberhasilan proses pembangunan infrastruktur desa. dan bertanggung jawab. Proses penerapan kegiatan pelatihan menghasilkan rekomendasi berikut : 1) Untuk lebih memahami informasi yang disampaikan, perangkat desa yang menjadi peserta pelatihan hendaknya selalu mengkaji modul-modul yang telah disediakan. 2) Standar Nasional Indonesia (SNI) kajian teknis bangunan gedung, yang direvisi secara berkala sebagai respons terhadap perubahan dan kemajuan di bidangnya. 3) Untuk memastikan bahwa mitra layanan memahami sepenuhnya informasi penting yang terdapat dalam rencana dan desain bangunan yang harus diserahkan, diperlukan sosialisasi lebih lanjut.

E. Daftar Pustaka

- David S.V. L Bangguna, Ebelhart O. Pandoyu, Elisabeth O. Wuon, Pujiono, Henny I. Abulebu, M. M. T. (2021). Pelatihan Autocad Dan Rab Untuk Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpd) Kecamatan Pamona Puselemba. *MARTABE Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Jumiati Ilham, Ervan Hasan Harun, A. U. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ELDIMAS*, 1(1), 8–18.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. *Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*, 1–18.
- Muhammad Yunus, Nurul Muhlisah, J. P., & Supriyani Lomo, S. L. (2023). Pelatihan Penyusunan Rab (Rencana Anggaran Biaya) Bagi Aparat Kampung Sekban Distrik

Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 06(1), 182–192.

Sarasanty, Diah; Tri Asmorowati, Erna; Nizar Zulfika, D. (2023). Pendampingan Perangkat Desa Puloniti Dalam Perencanaan Kegiatan Fisik Dana Desa. *Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa IKHLAS*, 02(1), 1–7.

Sarasanty, D., Sutrisno, E., & Andriyanto, J. (2022). Peningkatan Kemampuan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Polindes Pemerintah Desa Meluntur Lamongan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(3), 1797–1807.

Sarasanty, D., Sutrisno, E., & Asmorowati, E. T. (2021). Rehab Sarana Olahraga Melalui Pendampingan Perencanaan Teknik Pembangunan Lapangan Voli. *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 4(1), 1–8.

Yati, Y. U., Amin, M. S., Ghulam R, M., & Utami, S. W. (2018). Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Infrastruktur Desa Bagi Perangkat Desa Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi. *J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v3i1.838>

Yoedono, B. S., & Murdiyanto, D. (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Keterampilangambar Teknik Dan Rencana Anggaran Biaya (Rab) Bagi Perangkat Desa Sitiarjo. *Abdimas*, 2(2).

Yuni Ulfiyat, M. Shofiul Amin, Mirza Ghulam R, S. W. U. (2018). Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Infrastruktur Desa Bagi Perangkat Desa Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*, 3(1), 19–24.